

## THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL BACKGROUND ON POLITICAL PARTICIPATION IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS

Permana Bayu Maulana<sup>1</sup>, Ana Maulana<sup>2</sup>, Supriadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial  
Bahasa dan Sastra, Institut Pendidikan Indonesia Garut, JL. Terusan pahlawan No 83, Sukagalih,  
Tarogong Kidul, Kabupaten Garut,  
Jawa Barat, 44151, Indonesia

<sup>1</sup>permanabayumaulana@gmail.com

<sup>2</sup>maulanaana@institutpendidikan.ac.id

<sup>3</sup>supriadi@gmail.com

(Received: 9 Desember 2025 / Accepted: 18 Desember 2025 / Published Online: 11 Januari 2026)

### ABSTRACT

*This research is motivated by a lack of public awareness regarding political participation, many parties participate in politics not because of self-awareness but there are parties who influence it, one way is by conducting money politics and the main target parties are ordinary people or those whose educational background is still low. This research aims to examine the influence of educational background on community political participation in the 2024 Legislative Election in RW 04 Kampung Ngenol, Puspamukti Village, Cigalontang District, Regency Tasikmalaya. This research uses a quantitative research method with a survey method by distributing questionnaires to 40 respondents who have different educational backgrounds. The research results show that the level of education has a significant effect on political participation, with the higher a person's level of education, the more likely they are to be involved in the political process, especially in the 2024 Legislative Election. Even though the level of political participation in the 2024 Election is relatively good (83%), community involvement in deeper political activities, such as public discussions and campaigns, is still limited, especially among people with low educational backgrounds. People who are highly educated tend to be more active in accessing political knowledge, discussing, and even participating in higher political activities such as holding political or administrative positions. These findings conclude that education has a crucial role in improving the quality of people's political participation, which in turn can contribute to the progress of democracy and political development in Indonesia.*

**Keywords:** Educational background, political participation, 2024 Legislative Election

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi politik, banyak pihak yang melakukan partisipasi politik bukan karena kesadaran diri tetapi ada pihak yang mempengaruhinya, salah satu caranya adalah dengan melakukan *money politik* dan pihak yang menjadi target utama adalah masyarakat awam atau yang latar belakang

pendidikannya masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh latar belakang pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2024 di RW 04 Kampung Ngenol, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran angket kepada 40 Orang responden yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam proses politik, khususnya dalam Pemilu Legislatif 2024. Meskipun tingkat partisipasi politik dalam Pemilu 2024 tergolong baik (83%), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik yang lebih mendalam, seperti diskusi publik dan kampanye, masih terbatas, terutama di kalangan masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah. Masyarakat yang berpendidikan tinggi cenderung lebih aktif dalam mengakses pengetahuan politik, berdiskusi, dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan politik yang lebih tinggi seperti menjabat dalam posisi politik atau administratif. Temuan ini menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kemajuan demokrasi dan pembangunan politik di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Latar belakang pendidikan, partisipasi politik, Pemilu Legislatif 2024*

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai warga negara [1], [9], [22]. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga nilai-nilai yang diperlukan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan tentang sistem politik, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran dan sikap warga negara agar mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis [11], [12]. Oleh karena itu, kualitas pendidikan sering dikaitkan dengan kualitas demokrasi dan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik [2], [7].

Dalam perspektif ilmu politik, partisipasi politik dimaknai sebagai keterlibatan warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses politik, mulai dari memberikan suara dalam pemilu hingga terlibat dalam diskusi dan kegiatan politik lainnya [3], [4], [6]. Partisipasi politik yang tinggi dan berkualitas dianggap sebagai salah satu indikator penting berjalannya sistem demokrasi secara sehat [3], [15]. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor struktural seperti sistem pemilu atau peran partai politik, tetapi juga oleh faktor kultural dan individual, termasuk tingkat pendidikan, minat politik, serta akses terhadap informasi [4], [5], [19].

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan dan sikap politik warga negara. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya berkorelasi dengan kemampuan literasi yang lebih baik, sikap kritis terhadap isu publik, dan keterlibatan yang lebih aktif dalam proses demokrasi [10], [14]. Penelitian mengenai pendidikan politik juga menunjukkan bahwa penguatan literasi politik, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal, dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban politik warga serta mendorong mereka untuk menggunakan hak pilih secara lebih bertanggung jawab [17], [20]. Di sisi lain, studi tentang pendidikan politik di masyarakat

menekankan pentingnya program pendidikan politik yang terencana agar partisipasi masyarakat tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas [5], [17], [20].

Dalam konteks perkembangan demokrasi di era digital, kehadiran media sosial dan teknologi komunikasi turut membuka ruang baru bagi pendidikan dan partisipasi politik. Penelitian Tetep dkk. [23], misalnya, menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital seperti WhatsApp dalam model *Project Citizen* mampu membangun karakter sosial dan mendorong keterlibatan siswa dalam isu-isu publik. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan dan literasi politik yang difasilitasi teknologi dapat memperkuat partisipasi warga, terutama di kalangan generasi muda. Namun demikian, dampak nyata pendidikan formal terhadap partisipasi politik di tingkat akar rumput tetap perlu dikaji secara kontekstual sesuai karakteristik sosial masyarakat setempat.

RW 04 Kampung Ngenol, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan salah satu lingkungan yang warganya memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pada Pemilu Legislatif 2024, seluruh warga yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di lingkungan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Legislatif 2024 di RW 04 Kampung Ngenol, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif survei. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan pendidikan dan partisipasi politik di tingkat lokal serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program pendidikan dan pendidikan politik di masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei asosiatif untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan (X) terhadap partisipasi politik (Y) pada Pemilu Legislatif 2024 di RW 04 Kampung Ngenol, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengukur hubungan antarvariabel secara objektif melalui pengolahan data angka dan analisis statistik [7], [8].

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga RW 04 yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu Legislatif 2024. Sampel berjumlah 40 responden yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian [7]. Kriteria yang digunakan adalah: (1) berdomisili di RW 04, (2) berusia  $\geq 17$  tahun atau sudah menikah, dan (3) terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Legislatif 2024.

Variabel latar belakang pendidikan (X) diukur melalui jenjang pendidikan formal terakhir yang ditempuh responden (SD, SMP, SMA/SMK, atau perguruan tinggi) yang dicantumkan dalam angket identitas. Variabel partisipasi politik (Y) diukur menggunakan angket tertutup berskala bertingkat yang memotret keterlibatan responden dalam Pemilu Legislatif 2024, antara lain: keikutsertaan memberikan suara, keterlibatan dalam kegiatan kampanye atau sosialisasi, keaktifan dalam diskusi politik, dan perhatian terhadap informasi politik. Skor total angket menggambarkan tingkat partisipasi politik masing-masing responden.

Data dikumpulkan melalui angket dan dokumentasi. Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai latar belakang pendidikan dan partisipasi politik responden,

sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui daftar pemilih tetap (DPT) dan data partisipasi pemilih di wilayah penelitian.

Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan sebaran skor kedua variabel (distribusi jenjang pendidikan, rata-rata dan kategori partisipasi politik). Analisis inferensial digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh latar belakang pendidikan terhadap partisipasi politik melalui uji linearitas, korelasi Pearson, dan regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS pada taraf signifikansi 0,05 [8].

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan **40 responden** warga RW 04 Kampung Ngenol, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu Legislatif 2024. Secara umum, responden memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta menunjukkan variasi tingkat partisipasi politik dalam pemilu.

Untuk menguji hubungan antara **latar belakang pendidikan** dan **partisipasi politik**, dilakukan serangkaian analisis statistik menggunakan bantuan program SPSS, meliputi uji linearitas, uji korelasi Pearson, dan uji regresi linear sederhana.

#### 1) Hasil uji linearitas

Hasil uji linearitas yang dirangkum pada Tabel 4.1

**Tabel 4.1 Hasil uji Linearitas**  
ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
latar belakang pendidikan partisipasi politik	Between Groups	(Combined)	2.993	3	.998	2.546	.071
		Linearity	1.827	1	1.827	4.664	.038
		Deviation from Linearity	1.166	2	.583	1.487	.240
	Within Groups		14.107	36	.392		
	Total		17.100	39			

menunjukkan bahwa hubungan antara latar belakang pendidikan dan partisipasi politik bersifat linear. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi pada komponen *Linearity* sebesar 0,038 ( $F = 4,664$ ;  $\text{Sig.} = 0,038$ ) yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Sementara itu, nilai signifikansi pada komponen *Deviation from Linearity* sebesar 0,240 ( $F = 1,487$ ;  $\text{Sig.} = 0,240$ ) lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat penyimpangan hubungan yang signifikan dari bentuk linear. Dengan demikian, syarat linearitas untuk analisis korelasi dan regresi telah terpenuhi.

#### 2) Hasil uji korelasi Pearson

Hasil uji korelasi Pearson yang tersaji pada Tabel 4.2

**Tabel 4.2 Hasil Uji Kolerasi persion**

### Correlations

		latar belakang pendidikan	partisipasi politik
latar belakang pendidikan	Pearson Correlation	1	.327*
	Sig. (2-tailed)		.040
	N	40	40
partisipasi politik	Pearson Correlation	.327*	1
	Sig. (2-tailed)	.040	
	N	40	40

menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara latar belakang pendidikan dan partisipasi politik adalah  $r = 0,327$  dengan nilai signifikansi  $0,040$  ( $p < 0,05$ ;  $n = 40$ ). Nilai  $r$  positif ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel: semakin tinggi latar belakang pendidikan responden, cenderung semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya. Besarnya koefisien korelasi (sekitar  $0,33$ ) mengindikasikan hubungan yang berada pada kategori **rendah-sedang**, tetapi secara statistik signifikan.

### 3) Hasil uji regresi linear sederhana

Analisis regresi linear sederhana yang dirangkum pada Tabel 4.3

**Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Linear sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1 (Constant)	1.909		5.085	.000
partisipasi politik	.477	.484	3.411	.002

menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik. Persamaan garis regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 1,909 + 0,477X$$

dengan keterangan:

- **konstanta (a) = 1,909**,
- **koefisien regresi (b) = 0,477**,
- **koefisien Beta terstandar = 0,484**,
- **t hitung = 3,411**, dan
- **nilai signifikansi = 0,002 ( $p < 0,05$ )**.

Nilai signifikansi  $0,002$  yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa koefisien regresi tersebut **signifikan**, sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh latar belakang pendidikan terhadap partisipasi politik dapat **diterima**. Koefisien regresi positif ( $0,477$ ) menandakan bahwa setiap peningkatan satu tingkat latar belakang pendidikan diikuti oleh peningkatan skor partisipasi politik.

Secara keseluruhan, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat RW 04 pada Pemilu Legislatif 2024. Temuan ini menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut pada subbagian berikutnya.

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan memiliki hubungan positif dan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat RW 04 Kampung Ngenol pada Pemilu Legislatif 2024. Koefisien korelasi Pearson sebesar  $r = 0,327$  ( $p < 0,05$ )

dan hasil regresi linear sederhana dengan koefisien regresi  $b = 0,477$  ( $p = 0,002$ ) menegaskan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan responden, cenderung semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya. Temuan ini sejalan dengan pandangan ilmu politik yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu faktor penting pembentuk kesadaran dan perilaku politik warga negara [3], [4], [6], [15].

Dalam teori partisipasi politik, Almond dan Verba memandang partisipasi sebagai bagian dari budaya politik yang terbentuk melalui orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif warga terhadap sistem politik [3]. Sementara itu, Rush dan Althoff menekankan bahwa tingkat pendidikan memengaruhi kemampuan warga untuk memahami informasi politik dan mengambil bagian dalam proses politik [6]. Dengan demikian, hubungan positif antara pendidikan dan partisipasi politik yang ditemukan dalam penelitian ini konsisten dengan kerangka teori yang menyatakan bahwa individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan politik yang lebih baik, sikap yang lebih rasional, dan kemauan yang lebih besar untuk terlibat dalam proses demokrasi [4], [15].

Sejumlah penelitian terdahulu juga menguatkan temuan ini. Arniti menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat berkaitan dengan pengetahuan politik dan kesadaran warga terhadap pentingnya suara mereka dalam pemilu [10]. Ginting dan Ivanna menunjukkan bahwa pendidikan dan kualitas sistem pendidikan berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas partisipasi politik warga [14]. Demikian pula, kajian pendidikan politik menegaskan bahwa penguatan literasi politik, baik melalui jalur pendidikan formal maupun program pendidikan politik nonformal, dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban politik warga [5], [17], [20]. Dalam konteks RW 04, hasil regresi yang signifikan menunjukkan bahwa pola umum tersebut juga berlaku di tingkat lokal: responden dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi cenderung menunjukkan partisipasi yang lebih baik dalam Pemilu Legislatif 2024.

Namun, besarnya koefisien korelasi yang berada pada kategori rendah–sedang menunjukkan bahwa pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan tinggi-rendahnya partisipasi politik. faktor lingkungan sosial dan pengalaman politik juga berperan dalam membentuk pola partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal [21]. Berbagai kajian tentang budaya politik dan gender dalam politik, misalnya, menyoroti peran keluarga, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta norma sosial dalam mendorong atau menghambat partisipasi warga [3], [5], [19]. Di lingkungan pedesaan seperti RW 04, mobilisasi dari tokoh formal dan informal serta kedekatan isu pemilu dengan kepentingan sehari-hari dapat mendorong partisipasi tinggi bahkan pada warga dengan pendidikan rendah. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian responden berpendidikan dasar tetap dapat menunjukkan partisipasi politik yang cukup aktif, sementara warga berpendidikan lebih tinggi tidak selalu otomatis sangat partisipatif.

Dari sisi pendidikan politik, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa peningkatan partisipasi politik tidak dapat hanya mengandalkan perluasan akses pendidikan formal, tetapi perlu diiringi dengan program pendidikan politik yang terencana. Husna dan Fahrimal menegaskan bahwa pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat mampu meningkatkan kesadaran politik warga dan mendorong penggunaan hak pilih secara lebih bertanggung jawab [17]. Nurdin menunjukkan bahwa pengaturan pendidikan politik oleh partai politik penting agar proses sosialisasi politik berjalan terarah dan tidak hanya bersifat mobilisasi sesaat [20]. Dengan demikian, latar belakang pendidikan yang lebih tinggi perlu ditopang oleh ekosistem pendidikan politik yang sehat agar partisipasi warga tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dalam hal kesadaran dan orientasi pada kepentingan publik.

Dalam konteks demokrasi di era digital, pemanfaatan teknologi komunikasi juga menjadi faktor pendukung penting. Penelitian Tetep dkk. menunjukkan bahwa penggunaan platform

digital seperti WhatsApp dalam model *Project Citizen* mampu membangun karakter sosial dan mendorong keterlibatan peserta didik dalam isu-isu publik [23]. Warga dengan pendidikan lebih tinggi umumnya lebih mudah memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses informasi politik, mengikuti diskusi daring, dan mengorganisasi partisipasi kolektif. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa responden berpendidikan lebih tinggi menunjukkan kecenderungan partisipasi yang lebih baik, baik dalam bentuk partisipasi konvensional (menggunakan hak pilih) maupun partisipasi nonkonvensional (diskusi, kampanye, pengawasan).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pendidikan dan partisipasi politik memiliki hubungan yang saling menguatkan. Pendidikan yang lebih baik cenderung mendorong munculnya partisipasi politik yang lebih sadar dan rasional, sementara partisipasi politik yang tinggi memberi tekanan agar negara dan pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Temuan empiris di RW 04 Kampung Ngenol mendukung teori partisipasi politik dan hasil penelitian terdahulu yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar penting bagi terbangunnya budaya politik demokratis di tingkat akar rumput, sekaligus menunjukkan perlunya sinergi antara pendidikan formal, pendidikan politik, dan dukungan lingkungan sosial dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap 40 responden warga RW 04 Kampung Ngenol, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik pada Pemilu Legislatif 2024. Hasil uji korelasi dan regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan formal, semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik warga. Namun, kekuatan hubungan yang berada pada kategori rendah-sedang mengindikasikan bahwa pendidikan bukan satu-satunya faktor penentu. Partisipasi politik juga dipengaruhi oleh faktor sosial lain, seperti lingkungan keluarga, tokoh masyarakat, organisasi sosial-keagamaan, pengalaman berorganisasi, dan akses informasi politik. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal memerlukan perluasan akses pendidikan yang disertai penguatan pendidikan politik yang berkelanjutan agar partisipasi masyarakat tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahdar, *Ilmu Pendidikan*. Sulawesi Selatan, Indonesia: Parepare Nusantara Press, 2021.
- [2] A. Arif *et al.*, "Ilmu pendidikan," *Pujangga*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [3] G. Almond and S. Verba, *Budaya Politik (Tingkah Laku dan Demokrasi di Lima Negara)*. Jakarta, Indonesia: Bina Aksara, 1984.
- [4] M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [5] E. Handoyo and Lestari, *Pendidikan Politik*. Yogyakarta, Indonesia: Pohon Cahya, 2017.

- [6] M. Rush and P. Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers Citra Niaga, 1995.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 24th ed. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2016.
- [8] R. Sundayana, *Statistika Penelitian Pendidikan*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2018.
- [9] Y. Citriadin, *Pengantar Pendidikan*. Mataram, Indonesia: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Mataram, 2019.
- [10] N. K. Arniti, "Partisipasi politik masyarakat dalam ...atif di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 4, no. 2, p. 329, 2020.
- [11] D. Asdrayany, M. N. Muhajir, A. Fauzi, and A. Q. [penulis], "...ngkup politik pendidikan," *Journal on Education*, vol. 6, no. 1, pp. 6840–6852.
- [12] M. Anshari, "Partisipasi penyandang disabilitas pada ...u serentak tahun 2024 di Kalimantan Selatan," *Ayan*, vol. 15, no. 1, pp. 37–48, 2024.
- [13] L. M. B. Ginting and J. Ivanna, "Pengaruh ...itas pendidikan Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 8, no. 1, pp. 725–733, 2024.
- [14] Y. Hartono, "Pendidikan dan kebijakan politik (kajian ...asi)," *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, vol. 6, no. 1, pp. 35–45, 2016.
- [15] A. Husna and Y. Fahrimal, "Pendidikan politik: Upaya p...", *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, vol. 3, no. 1, pp. 85–100, 2021.
- [16] R. Iskandar, "Partisipasi politik ... Kota Tangerang Selatan dalam Pilkada tahun 2020 di masa pandemi," *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- [17] A. Kiftiyah, "Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, vol. 14, no. 1, pp. 1–13, 2019.
- [18] P. H. Nurdin, "Politik hukum pengaturan pendidikan politik oleh partai politik," *Jambura Law Review*, vol. 1, no. 2, pp. 144–166, 2019.
- [19] A. Z. Syahputri, F. D. Fallenia, and R. Syafitri, "[...]" *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 2, no. 1, pp. 160–166.
- [20] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.
- [21] T. Tetep, J. Jamilah, E. Dimyati, and O. Hermanto, "Opportunities or challenges? Building student social character through WhatsApp-based Project Citizen in disruptive era," in *Proc. 1st Int. Conf. Business, Law and Pedagogy (ICBLP)*, Sidoarjo, Indonesia, Feb. 2019, doi: 10.4108/eai.13-2-2019.2286090.